

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DAERAH PEGUNUNGAN TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE

Muhammad Rais Rahmat Razak*)

Siti Harfiah*)

Dosen Stisip Muhammadiyah Rappang /Ilmu Pemerintahan & Mahasiswa S3 Administrasi Publik
Universitas Negeri Makassar

Alumni Stisip Muhammadiyah Rappang /Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang.

Email : mraisrahmat@yahoo.com

***Abstract** : Community participation in mountainous areas towards the realization of Good Governance in Maiwa District, Enrekang Regency ". The study aims to 1) To determine the participation of the community in the mountainous area of Maiwa Subdistrict 2) To find out the realization of good governance in Maiwa Subdistrict 3) To determine the effect of community participation in the mountainous region on the realization of good governance in Maiwa District, Enrekang Regency. The method used is descriptive quantitative research with frequency table analysis techniques to determine the condition of independent and dependent variables, namely the participation of people in mountainous regions as the variable "X" and the realization of good governance as a variable "Y", while to find out the formulation of associative problems using Simple Linear Regression Analysis . The results showed that the participation of the community in the mountainous area of Maiwa Subdistrict was 69.2 in the "Good" category. The realization of 77.02 percent good governance in the category of "Good" while the influence of participation in the mountainous community towards the realization of good governance using simple linear regression analysis then processed using spss version 20.00 obtained R² or R square values from the summary table of 0.239 or 23.9 percent Community participation in mountainous regions has an influence on the realization of good governance in Maiwa Subdistrict, Enrekang Regency. While 76.1 percent is caused by other factors not examined.*

***Keywords:** participation, community, mountainous area, good governance*

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat telah menjadi keniscayaan dalam membangun sebuah daerah, khususnya dalam skema pelaksanaan otonomi daerah yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan janji-janji politik yang banyak disampaikan dalam berbagai kontektasi pemilihan Pemimpin Daerah dan anggota legislatif. Namun pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan yang merupakan hasil perencanaan pembangunan nasional tidak maksimal pemanfaatannya di daerah terutama di daerah pegunungan, karena keterbatasan infrastruktur, kondisi pemukiman

berpencar dan saling berjauhan sehingga menyulitkan dalam mobilisasi penduduk. Sangat berbeda dengan daerah pegunungan yang telah menjadi kota dan bahkan telah menjadi destinasi menarik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia seperti halnya dengan Kota Bandung. Namun di daerah yang kurang terekspos seperti halnya di kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang lebih 80% terdiri dari pegunungan, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, energi dan jaringan telekomunikasi turut membatasi akselerasi pembangunan di daerah. Fakta ini menunjukkan sebagian besar wilayah merupakan area pegunungan Sehingga diperlukan perhatian khusus dari Pemerintah khususnya dalam hal pelibatan atau partisipasi masyarakat

dalam kegiatan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang disebut dengan *Good Governance*. Menurut Adisasmita, Raharjo dalam Mustanir, Ahmad; Razak, MRR. 2017. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Sehingga untuk menjaga kesinambungan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka diperlukan tingkat partisipasi tinggi dari masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dilihat sebagai proses tetapi juga merupakan hasil akhir, yang mana partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui potensi dan kendala apa yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Dalam sistem pemerintahan aktualisasi partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Timbulnya partisipasi masyarakat merupakan ekspresi perilaku masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan, keterlibatan aktif masyarakat didasari oleh tiga faktor pendukung, yaitu kemauan, kemampuan, dan adanya kesempatan untuk terlibat aktif dalam berpartisipasi.

Perwujudan *good governance* telah menjadi kebutuhan mutlak masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Namun kondisi daerah pegunungan yang memiliki berbagai hambatan infrastruktur dapat membuka ruang untuk terjadinya pembenaran terhadap berbagai penyimpangan praktek *good governance* di lapangan, dan aparat cenderung melakukan pembiaran karena banyaknya permasalahan yang dihadapi. Perwujudan *good governance* menghendaki adanya proses pemerintahan lebih baik, mulai dari proses perumusan tingkatan kinerja, arus investasi dan komunikasi pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan *good governance* menuntut adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Hasil observasi awal dengan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada akhir september tahun 2017. Calon peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Kurangnya masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan di Kecamatan Maiwa karena kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki serta kurang percaya kepada pemerintah dalam mengelola program.
2. Kurangnya tanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan kecamatan yang melibatkan masyarakat, terlihat dari seringnya masyarakat datang terlambat bahkan tidak hadir dalam suatu kegiatan masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran aparaturnya kecamatan dalam mencari tahu informasi yang dapat digunakan untuk menangani berbagai masalah kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat setempat.
4. Masyarakat kurang mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat langsung dalam menentukan

program-program pembangunan oleh kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami “*Partisipasi Masyarakat di daerah Pegunungan terhadap perwujudan Good Governance*”. Dengan lokus Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat di daerah pegunungan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana perwujudan *good governance* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana Pengaruh partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan *good governance* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Tujuan, Manfaat dan Urgensi Penelitian

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan pemahaman terhadap partisipasi masyarakat di daerah pegunungan, perwujudan *good governance* dan hubungan antara keduanya di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Urgensi Penelitian

Penerapan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tuntutan publik yang mendesak untuk diwujudkan sejalan dengan program pemerintah untuk terus menerus melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik, namun berbagai kondisi geografis seperti di daerah pegunungan tidak dapat dihindari sehingga dibutuhkan adanya pengetahuan dan pemahaman yang konstruktif terhadap kondisi aktual di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Totok Mardikanto (dalam Mustanir, 2017: 356) mengatakan bahwa partisipasi

masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai hasil akhir terhadap perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat meperjelas mengenai “partisipasi” langsung masyarakat terhadap pengambilan segala keputusan pada lembaga pemerintahan. Sirojuzilan (2011: 34) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai jenis keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijaksanaan serta pengambilan keputusan terhadap berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Isbandi (dalam Mustanir, Ahmad dan Razak, MRR 2017: 5) mengatakan bahwa pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi adalah hak dalam berpolitik yang melekat pada masyarakat seperti hak politik lainnya. Hak itu tidak akan hilang ketika masyarakat memberikan kepercayaan pada orang lain untuk duduk dalam instansi pemerintahan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan masyarakat di instansi pemerintahan dapat menutupi kegagalan dalam demokrasi rakyat.
- c. Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam pengambilan keputusan masyarakat dapat memunculkan keterlibatan masyarakat yang lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara teratur, bukan dengan cara kebetulan.
- e. Berkaitan dengan penyerahan kewenangan sebagai alat yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- f. Partisipasi masyarakat dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka disimpulkan bahwa jika partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan maka di dalam berbagai bidang kehidupan akan mempengaruhi cara masyarakat dalam bertindak.

Prinsip-prinsip Partisipasi

Solekhan (2014: 153) mengatakan bahwa pengembangan partisipasi masyarakat itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh yang menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu sama lain. Artinya, tidak ada satu formalisasi yang baku tentang konsep partisipasi.

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Adisasmita (dalam Mustanir, 2017: 3) mengemukakan bentuk dan tipe partisipasi terdiri dari:

- a. Partisipasi uang adalah model partisipasi yang digunakan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi dalam bentuk tenaga yang digunakan untuk pelaksanaan usaha-usaha guna menunjang keberhasilan suatu kegiatan.
- c. Partisipasi buah pikiran adalah model partisipasi dalam hal penyumbangan ide, pendapat atau gagasan, baik dalam menyusun kegiatan maupun untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan juga untuk menjadikannya kenyataan dengan memberikan pengalaman dan kemampuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- d. Partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan yaitu masyarakat ikut serta dalam setiap pembicaraan dalam rangka untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/amanah kepada orang

yang dipercayai yang duduk dalam organisasi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi

Wisistiono (2006: 87) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat untuk aktif berpartisipasi, meliputi:

- a. Usia
Faktor usia adalah faktor yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu kegiatan yang ada.
- b. Jenis kelamin
Nilai yang cukup lama menguasai dalam budaya berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya perempuan adalah tempatnya “di dapur” yang artinya adalah dalam masyarakat tugas dan fungsi perempuan yang pokok adalah mengurus rumah tangga, tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan wanita yang semakin baik dan meningkat.
- c. Pendidikan
Pendidikan sebagai salah satu syarat penting dalam aktif berpartisipasi. Pendidikan dapat memengaruhi perilaku hidup seseorang dengan lingkungannya, suatu perilaku yang diperlukan bagi peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan
Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan individu akan menentukan berapa penghasilan yang dapat diperolehnya. Pekerjaan yang baik akan meningkatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan serta memotivasi individu untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Artinya bahwa untuk terlibat dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh keadaan ekonomi yang baik.
- e. Lamanya tinggal
Lamanya individu tinggal dalam suatu lingkungan dan pengalamannya

terhadap suatu tindakan dengan lingkungan akan berpengaruh pada keterlibatan individu.

Jenis Partisipasi dalam Masyarakat

Totok Mardikanto (2013: 67) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Partisipasi dalam identifikasi masalah yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengenali suatu masalah terutama berkaitan dengan penentuan pilihan dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan mengenai beberapa pendapat tentang kepentingan bersama.
- b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berhubungan dengan penentuan pilihan dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan tentang berbagai pendapat mengenai kepentingan bersama.
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan merupakan lanjutan kesepakatan dari rencana sebelumnya, baik yang berhubungan dengan perencanaan hingga pelaksanaan suatu tujuan.
- d. Partisipasi dalam evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam penilaian akhir ini berhubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau terdapat penyimpangan.

Good Governance

Reformasi pemerintahan di Indonesia beberapa tahun terakhir memunculkan istilah baru yang disebut sebagai *Good Governance*. Popularitas istilah ini muncul dalam kalangan pemerintah, akademik, dan lembaga masyarakat. Istilah *Good Governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan

(manajemen). Sedarmayanti (2012: 3) mengemukakan bahwa *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu: Pertama, sesuatu yang menjunjung tinggi nilai keinginan/ kehendak masyarakat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, kegunaan dari suatu pemerintahan yang cepat dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

United Nation Development Program (dalam Sedarmayanti, 2012: 5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi:

1. Partisipasi (*participation*), setiap masyarakat, pria maupun wanita memiliki hak suara yang setara dalam suatu pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing.
2. Aturan hukum (*rule of law*), kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transparency*), keterbukaan seharusnya dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), setiap organisasi pemerintahan prosesnya harus diarahkan dalam upaya untuk memberika pelayanan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), tata pemerintahan yang baik akan berinisiatif sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda guna mencapai *consensus* yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.
6. Keadilan (*Equality*), tata pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap pria dan wanita dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), setiap proses kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan potensi melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*), pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat umum, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
9. Bervisi strategis (*strategic vision*), pimpinan dan masyarakat harus memiliki pandangan yang luas dan panjang mengenai penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sinambela (2006:48) memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban.
2. Transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai

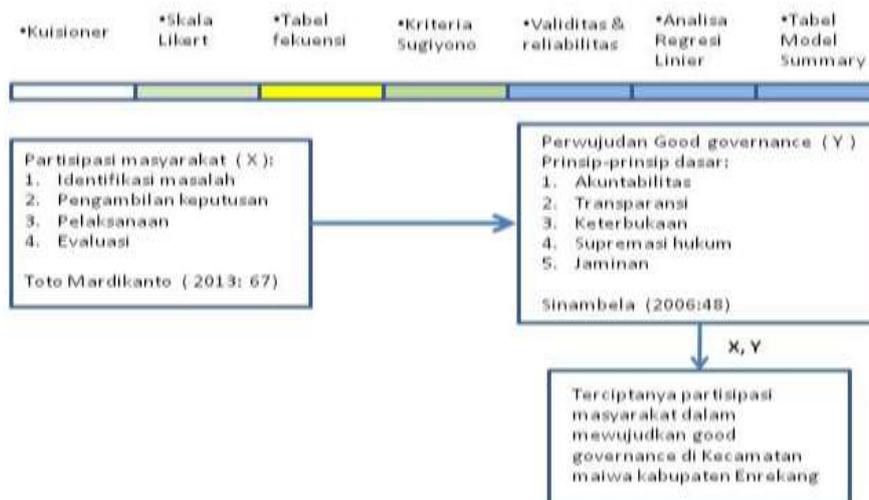
kebijakan Pemerintah dan organisasi badan hukum.

3. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
4. Berdasarkan hukum (supremasi hukum) yaitu keputusan dan kebijakan pemerintah serta organisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan berdasarkan hukum.
5. Jaminan, *fairness, a level playing field* (perlakuan yang adil/ perlakuan kesetaraan).

Beranjak dari pendapat ahli tersebut di atas maka disimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik maka wujud dari interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat adalah berorientasi pada distribusi kekuatan dan kekuasaan yang adil dalam seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan yang ada.

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melihat gambaran mengenai partisipasi masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terhadap perwujudan *good governance*. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₀ : Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap perwujudan *good governance*.

H₁ : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap perwujudan *good governance*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Karena penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk menyatakan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan *good governance*. Lokus penelitian di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, ruang lingkup akan dibatasi pada rumusan masalah deskriptif atau mandiri yaitu partisipasi masyarakat dan perwujudan *good governance*, dan rumusan masalah asosiatif yaitu bagaimana pengaruh variabel X (partisipasi masyarakat) terhadap variabel Y (perwujudan *good governance*). Definisi operasional partisipasi masyarakat terkait keterlibatan masyarakat dalam kegiatan identifikasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi sedangkan perwujudan *good governance* terkait dengan penerapan Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan (29 Januari – 29 Maret 2018) di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Populasi yang digunakan merujuk pada pendapat Ahmad (2015: 137) bahwa populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji, total populasi dalam penelitian ini berjumlah

51 orang. Sample menggunakan teknik *sampling* jenuh, menurut Sugiyono (2016: 85) *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel yaitu 51 orang. Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi, kuisioner, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi penjelasan. Teknik Analisis Data, data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kuantitatif* dengan bantuan tabel frekuensi dan menggunakan *skala likert* sebagai alat ukur dan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan spss versi 20,00.

Skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk melakukan proses pengolahan data, maka dilakukan gradasi atau pembobotan dalam 5 skala sebagai berikut:

- Untuk jawaban sangat setuju bobot nilai 5
- Untuk jawaban setuju bobot nilai 4
- Untuk jawaban kurang setuju bobot nilai 3
- Untuk jawaban tidak setuju bobot nilai 2
- Untuk jawaban sangat tidak setuju bobot nilai 1

Rumus yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teknik tabulasi frekuensi, yaitu:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\% \quad \dots (1)$$

Keterangan:

P= hasil persentase

F= jumlah frekuensi responden

n= jumlah sampel

Rentanganya:

Skor= Frekuensi x Bobot

$$\text{Rata - rata skor} = \frac{\text{jumlah skor}}{\text{jumlah responden}} \dots (2)$$

$$\text{Rata - rata persentase} = \frac{\text{rata-rata skor}}{\text{karakteristik jawaban}} \times 100\%$$

..... (3)

Sugiyono (2016: 110) mengemukakan bahwa kualifikasi penilaian diambil berdasarkan lima tingkat pembagian, yaitu:

- a) Jawaban sangat baik : 81% - 100%
- b) Jawaban baik : 61% - 80%
- c) Jawaban kurang baik : 41% - 60%
- d) Jawaban tidak baik : 21% - 40%
- e) Jawaban sangat tidak baik : 0% - 20%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini mengambil objek aparat Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berjumlah 51 orang dengan distribusi jabatan dan pekerjaan seperti pada tabel 1 dibawah.

Tabel 1. Responder berdasarkan Pekerjaan & Jabatan

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Sekretaris Kecamatan	1 orang
2	Kasi Kesejahteraan Rakyat	1 orang
3	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 orang
4	Kasi Pelayanan Umum	1 orang
5	Kasi Pemerintahan	1 orang
6	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1 orang
7	Kasubag Keuangan	1 Orang
8	Kasubag Perencanaan	1 Orang
9	Lurah	1 Orang
10	Sekretaris Lurah	1 Orang
11	Staff	41 Orang
Jumlah		51 Orang

Sumber: Olahan Data Primer Tahun 2018.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Data hasil angket yang digunakan dinyatakan valid dan dapat dipercaya setelah dilakukan uji validitas dengan *product moment pearson correlation* untuk variabel “X” dan “Y”. Data dianggap valid jika diperoleh r hitung lebih dari r tabel (N=51, 5%) 0,279. Yaitu r hitung variabel “ X1” = 0,816; X2 = 0,744 X3= 0,865 dan X4= 0,658 dan r hitung variabel “ Y1 “ = 0,844 Y2= 0,814 Y3=0,849 Y4= 0,641 Y5= 0,604 kedua variabel utama nilainya lebih dari 0,279. Maka kedua variabel dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, data dianggap reliabel jika alpha cronbach’s lebih dari r tabel. Hasil uji menunjukkan variabel “X” = 0,806 dan variabel “ Y “ = 0,794 maka data dari kedua variabel tersebut dinyatakan reliabel dan dapat dipercaya.

Hasil Penelitian Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Partisipasi Masyarakat

No.	Partisipasi Masyarakat	Persentase (%)
1.	Partisipasi dalam Identifikasi Masalah	64,2
2.	Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	66,2
3.	Partisipasi dalam Pelaksanaan	72,6
4.	Partisipasi dalam Evaluasi (Menilai Hasil Akhir Kegiatan)	73,8
Jumlah		276,8
Skor rata-rata		$276,8 / 4 = 69,2 \%$

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.

Tabel 2 menjelaskan tanggapan responden tentang partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dari keempat indikator antara lain partisipasi dalam identifikasi masalah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam evaluasi diperoleh rata-rata persentase sebesar 69,2 % Menurut Sugiyono (2016:10) Nilai 69,2 termasuk dalam range pengukuran 61-80% (termasuk dalam kategori baik) hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dinyatakan sebagai indikator seperti dalam tulisan ini yang menurut Totok Mardikanto adalah termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah sudah baik.

Hasil penelitian perwujudan good governance

Berdasarkan hasil penelitian tentang *good governance* pada Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan *good governance* dapat dilihat pada tabel rekapitulasi:

Tabel 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang *Good Governance* pada Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

No.	<i>Good Governance</i>	Persentase (%)
1.	Akuntabilitas	73,8
2.	Transparansi	74,11
3.	Keterbukaan	81,2
4.	Supremasi Hukum	79,2
5.	Jaminan	76,8
Jumlah		385,11

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{385,11}{5} = 77,02 \%$$

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner Tahun 2018.

Tabel 3 menjelaskan tanggapan responden tentang *good governance* pada Kantor Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dari kelima indikator antara lain akuntabilitas, transparansi, keterbukaan,

supremasi hukum dan jaminan diperoleh rata-rata persentase sebesar 77,02% yang termasuk kategori baik.

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh X terhadap Y melalui Olahan SPSS

Untuk mengetahui pengaruh variabel “X” terhadap “Y” maka dapat dilakukan analisa regresi dengan bantuan spss versi 20.00. untuk mendapatkan nilai R square dari tabel Model Summary. Dari olah data variabel X dan Y didapatkan output seperti pada Tabel 2 dibawah.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 ^a	.239	.213	3,046

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat.

Tabel 4 di atas menjelaskan besarnya nilai prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,239 yang disebut dengan koefisien determinasi. dan merupakan hasil dari penguadratan R. yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (partisipasi masyarakat) terhadap variabel terikat (*good governance*) adalah sebesar 23,9 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

SIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, meliputi: identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi menunjukkan rata-rata persentase dari hasil rekapitulasi sebesar 69,2 % termasuk dalam kategori baik.
2. Perwujudan *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, hasil penelitian dengan

analisis tabulasi frekuensi menunjukkan rata-rata persentase sebesar 77,02 % termasuk dalam kategori baik.

3. Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan berpengaruh terhadap perwujudan good governance di Kecamatan maiwa kabupaten Enrekang. hal ini ditunjukkan dengan hasil olah spss versi 20.00, dimana dengan analisis regresi linear sederhana diperoleh output data dari tabel summary, R2 sebesar 0,239 atau 23,9 prosen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah pegunungan memiliki pengaruh 23,9 prosen terhadap perwujudan good governance sedangkan 76,1 prosen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: GavaMedia.

Dwipayana, A. (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Isbandi. W. (2007). *Partisipasi Masyarakat*. Balai Pustaka. Jakarta.

Labolo, M. (2011). *Birokrasi Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mardikanto, Totok. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Miraza, B. H, dkk. (2010). *Pembangunan Pedesaan: Teori dan Praktek*. Medan: USU Press

Mustanir, Ahmad & Rais, M. Rahmat Razak. Oktober 2017. *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towari Tololang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan. ISBN 978-602-50710-1-0. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Cetakan I. Hal 1-7.

Mustanir, Ahmad. April 2017. *Participation of Ethnic Community Towari Tolotang in Deliberation of Development Plan*. Publisher Antlantis Press Based Thomson Reuters Indexes . Edvances in Social Science, Education and Humanities Research Vol 84, International Conference on Etnics in Governance (ICONEG 2016) ISBN 978-94-6252-321-0. ISSN 2352-5398. Hal 356-359. doi: 10.2991/ iconeg-16.2017.79

_____. Nopember 2017. *Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method of Development Planning*. Proceedings Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach.

_____. Nopember 2017. *Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning*. Proceedings. Publisher Atlantis Press Based Thomson Reuters indexes. International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017). Part of Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research. ISBN 978-94-6252-415-6. ISSN 2352-5398. doi: 10.2991/ icodag-17.2017.60.

Vol 163. Hal 316-319.

Sedamayanti. (2012). *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sirojuzilam. (2011). *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan: USU Press.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Sugiharto. (2006). *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*. Medan: USU Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wisistiono, S. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV Fokus media.

Widjaja, HAW. (2004). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.